

# Revitalisasi Kearifan Lokal: Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Provinsi NTB

**Haidlor Ali Ahmad**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat  
Kementerian Agama RI  
Diterima redaksi, 6 Agustus 2013

## **Abstract**

*The purpose of this research are determining and describing the harmony situation in Dongo, Bima, Nusa Tenggara Barat; identifying and describing the conflict potential and its attempts to resolve it; knowing and describing the way people use local wisdom in order to harmony keeping, anticipating and resolving conflicts. The expected results of this research are: firstly, as an input to policy makers in maintaining harmony and increasement of community roles on harmony keeping through local wisdom revitalization. This research is part of the Participatory Action Researche (PAR). The main source of data in this study interviews, observation, documentation / literature review and Focus Group Discussion.*

**Keyword:** Konflik, Kerukunan, Kearifan Lokal.

## **Pendahuluan**

Sudah lebih dari satu dasawarsa kondisi bangsa Indonesia tidak pernah berhenti dilanda konflik. Jika kita flashback ke belakang, bangsa Indonesia sudah relatif lama berupaya menciptakan kerukunan antarumat beragama dan telah mengalami proses panjang. Sejak tahun 1966 telah dirintis pertemuan antar tokoh agama paska berbagai kerusuhan

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi kerukunan di Donggo, Bima, Nusa Tenggara Barat; untuk mengetahui dan mendeskripsikan potensi konflik dan upaya untuk mengatasinya; untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana masyarakat menggunakan kearifan lokal sebagai upaya mempertahankan kerukunan, mengantisipasi dan mengatasi konflik. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, *Pertama* sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam upaya pemeliharaan kerukunan; *Kedua* bagi peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan melalui revitalisasi kearifan lokal. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengambilan data wawancara, observasi, dan studi dokumen. Selain itu, penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan *Participatory Action Researche (PAR)*. Sumber utama data dalam penelitian ini hasil wawancara, pengamatan, studi dokumentasi/kepuustakaan dan *Focus Group Discussion*.

**Kata Kunci:** Konflik, Kerukunan, Kearifan Lokal.

yang bernuansa SARA, terutama berkaitan dengan perusakan rumah ibadat di berbagai tempat di Indonesia. Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama tokoh lintas agama mengolah berbagai kebijakan pemerintah dan dibantu datanya oleh Badan Litbang Agama. Kemudian muncul berbagai peraturan Menteri Agama, peraturan bersama dan seterusnya sebagai wujud kebersamaan dari pemerintah dengan

para tokoh lintas agama untuk bersama-sama mewujudkan kerukunan beragama yang menjamin perdamaian.

Pada tanggal 30 Juni 1980, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 tahun 1980 dibentuk Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB). Wadah tersebut berfungsi sebagai: 1) Forum untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan kerja sama antarwarga negara yang menganut berbagai agama; 2) Forum untuk membicarakan kerja sama dengan pemerintah. Dalam konsideran Surat Keputusan Menteri Agama itu dijelaskan tujuan dari WMAUB adalah: untuk meningkatkan pembinaan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama demi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa (Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007: 1-2).

Pada masa Dr. Tarmidzi Taher menjabat sebagai Menteri Agama RI – melalui Proyek Pembinaan Kerukunan Umat Beragama – dibentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan dan Ambon. Fungsi dan tujuan dibentuknya lembaga pengkajian ini tidak jauh berbeda dengan WMAUB. Perbedaannya, LPKUB lebih menekankan pada pengkajian yang melibatkan cendekiawan-cendekiawan dari berbagai agama. Baik LPKUB maupun WMAUB, keduanya dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah (*top-down*), bersifat elit dan kurang menyentuh masyarakat bawah (Ibid).

Pada era reformasi, dalam upaya mengantisipasi/mencegah meluasnya konflik, di berbagai daerah terutama di zona-zona damai, secara *bottom-up* telah dibentuk berbagai wadah (forum) kerukunan antar umat beragama. Di Sumatera Utara dibentuk FKAPA atau Forum Komunikasi Antar Pemuka Agama (Kustini, 2007: 49-50), di Sulawesi Utara terdapat Badan Kerja Sama Antar Umat

Beragama (BKSAUA), dan di kecamatan-kecamatan di berbagai daerah dibentuk Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB) antara lain, di Buleleng Bali (Ibid), Pahandut Kalimantan Tengah (Ahmad, 2007: 131), Mandonga Sulawesi Tenggara (Hakim, 2007: 428) dan lain-lain.

Setelah lahirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, FKUB atau forum-forum kerukunan sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat satu tahun sejak PBM ditetapkan 21 Maret 2006 (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010: 6; Lihat PBM Nomor 9 dan 8 Bab IX, Pasal 27 Ayat 2). Belakangan ini, meskipun pada umumnya forum-forum tersebut telah menyesuaikan dengan FKUB, namun di beberapa daerah, forum-forum kerukunan yang sudah dibentuk lebih dulu termasuk forum-forum kerukunan di tingkat kecamatan masih ada yang dipertahankan kelangsungannya.

Keberadaan FKUB maupun forum sejenis di tingkat kecamatan tidak bertentangan dengan PBM, karena FKUB dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk kepentingan dinamisasi kerukunan, tetapi tidak memiliki tugas formal sebagaimana FKUB tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Tanya Jawab PBM Bab III, Poin 3). Keberadaan FKUB atau forum sejenis di tingkat kecamatan di beberapa daerah sangat diharapkan oleh para tokoh agama, dengan alasan karena pada umumnya kasus/persoalan terjadi di tingkat kelurahan/kecamatan, sementara FKUB berada di tingkat kabupaten/kota (Ahmad, 2012: 207).

## Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana

kondisi kerukunan di daerah sasaran; (2) Bagaimana masyarakat menyadari adanya potensi konflik di wilayahnya dan berupaya untuk mengatasinya; (3) Bagaimana masyarakat merevitalisasi kearifan lokal (pengembangan wadah kerukunan dan ketahanan masyarakat local) sebagai upaya mempertahankan kerukunan, mengantisipasi dan mengatasi konflik.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi kerukunan di daerah sasaran; (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan potensi konflik dan upaya untuk mengatasinya; (3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana masyarakat menggunakan kearifan lokal (pengembangan wadah kerukunan dan ketahanan masyarakat local) sebagai upaya mempertahankan kerukunan, mengantisipasi dan mengatasi konflik. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, *Pertama* sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya pemeliharaan kerukunan; *Kedua* bagi peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan melalui revitalisasi kearifan lokal.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Selain itu, penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan *Participatory Action Research* (PAR) Pembentukan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat/umat beragama di wilayah Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB. Pemilihan wilayah ini sebagai sasaran penelitian dikarenakan beberapa faktor. *Pertama*, wilayah Kecamatan Donggo

terpencil di pegunungan dan terpisah oleh teluk dengan Kota Bima; *Kedua*, menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Rahman, etnis Donggo termasuk tipe masyarakat pedesaan dan tidak mengalami gelombang pengaruh kebudayaan luar (Rahman dan Nurmukminah, 2011: 38-39). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, pengamatan, studi dokumentasi/kepustakaan dan *focus group discussion* (FGD). Yang disebut terakhir ini, selain sebagai teknik pengumpulan data juga difungsikan sebagai upaya *check and recheck* untuk validasi data.

### Batasan Konsep

Kearifan lokal adalah suatu sintesis budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat (Ahmad, 2006: 102). Kearifan lokal dapat berupa institusi, adat istiadat, kata-kata bijak, dan pepatah. Kearifan lokal ada yang masih dalam bentuk aslinya, ada juga yang merupakan reka cipta kearifan lokal baru (*institutional development*), yaitu memperbaiki institusi-institusi lama yang pernah berfungsi baik dan dalam upaya membangun tradisi, yaitu membangun seperangkat institusi adat istiadat yang pernah berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sosial-politik tertentu pada suatu masa tertentu, yang terus menerus direvisi dan direkacipta ulang sesuai dengan perubahan kebutuhan sosial-politik dalam masyarakat. Pengembangan institusi ini harus dilakukan oleh masyarakat lokal itu sendiri, dengan melibatkan unsur pemerintah dan unsur-unsur non-pemerintah, dengan kombinasi pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (Amri Marzali, 2005).

### Sekilas Kecamatan Donggo

Kecamatan Donggo merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bima Provinsi NTB yang terletak di dataran tinggi Gunung Lambitu. Wilayah Kecamatan Donggo dibatasi oleh Kecamatan Soromandi di sebelah utara dan timur; Kecamatan Dompu di sebelah barat; dan Kecamatan Madapangga dan Kecamatan Bolo di sebelah selatan. Kecamatan Donggo terdiri dari sembilan desa, yaitu: Desa Oo, Kala, Dori Dungga, Mpili, Mbawa, Palama, Bumi Pajo, Rora, dan Ndano Nae.

Jumlah Penduduk Kecamatan Donggo dilihat dari setiap desa dapat dibaca pada tabel 1 berikut:

**Tabel: 1**

Jumlah Penduduk Setiap Desa di Kecamatan Donggo

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Oo	3.380
2	Kala	1.291
3	Dori Dungga	2.839
4	Mpili	1.624
5	Mbawa	4.216
6	Palama	1.217
7	Bumi Pajo	1.698
8/9	Rora/ Ndano Nae	1.937 (data sebelum pemekaran)
	Jumlah	18.202

Penduduk Kecamatan Donggo sebagian besar adalah penduduk asli, yakni etnis Donggo (Rahman 2011: 11). Etnis lain yang ada di wilayah ini jumlahnya sangat kecil. Mereka adalah para pendatang yang bertugas sebagai pegawai negeri dan para misionaris/zending. Sangat kecilnya jumlah etnis lain ini dikarenakan wilayah Kecamatan Donggo terpencil di pegunungan dan terpisahkan oleh teluk Bima dengan Kota Bima.

Etnis Donggo mendiami lereng Gunung Wawo dan Lambitu yang disebut sebagai Duo Donggo Ele. Sebagian

yang lain mendiami lereng Gunung Soromandi – setelah pemekaran masuk wilayah Kecamatan Soromandi – yang dikenal dengan sebutan Dou Donggo Ipa (Rahman dan Nurmukminah, 2011: 38).

Dalam keagamaan, etnis Donggo sangat patuh, tetapi karena mereka tinggal di wilayah yang terpencil di daerah pegunungan menyebabkan mereka sering mencampur-adukkan ajaran Islam dengan ajaran pra Islam (Ibid: 39). Jumlah penganut agama di Kecamatan Donggo per desa dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel: 2**

Jumlah Penganut Agama di Setiap Desa Di Kecamatan Donggo

No	Nama Desa	Agama		
		Islam	Katolik	Kriten
1	Oo	3.380		
2	Kala	1.291		
3	Dori Dungga	2.839		
4	Mpili	1.624		
5	Mbawa	3.260	874	82
6	Palama	843	80	106
7	Bumi Pajo	1.698		
8/9	Rora/Ndano Nae	1.937		
	Jumlah	15.872	954	188

Jumlah rumah ibadat dan rasionya dengan jumlah pengnut di Kecamatan Donggo per desa dapat disimak pada tabel 3 berikut:

**Tabel: 3**

Jumlah Rumah Ibadah dan Rasionya dengan Jumlah Penganut Dilihat Perdesa di Kecamatan Donggo

No	Desa	Masjid	Musala	Grj Katolik	Grj Kristen
1	Oo	2 (1/1.690)	5		
2	Kala	3 (1/430)	4		
3	Dori Dungga	3 (1/946)	7		
4	Mpili	3 (1/541)	2		
5	Mbawa	3 (1/1.087)	5	2 (1/874)	1 (1/82)
6	Palama	2 (1/422)	1	1 (1/80)	
7	Bumi Pajo	2 (1/849)	2		
8/9	Rora / Ndano Nae	2/1 (1/646)	3/1		
	Jumlah	21 (1/756)	30	3 (1/318)	1 (1/82)

Jumlah rumah ibadah tersebut, bagi umat Islam dengan asumsi umat Muslim melakukan shalat Jumat hanya di masjid, dan jumlah lelaki dewasa 1/3 dari jumlah penduduk maka jumlah rumah ibadah tersebut secara umum dapat dikatakan cukup memadai. Hanya Desa Oo, dengan rasio 1 masjid untuk 1.690 umat atau 1 masjid untuk 563 penduduk lelaki Muslim dewasa, yang perlu perluasan masjid atau penambahan jumlah masjid. Karena untuk ukuran masjid di desa dengan kapasitas di atas 500 orang memang sangat langka. Meski umat Muslim bisa melakukan shalat Jumat di masjid yang kapasitasnya kurang memadai, karena jamaah bisa melakukan shalat di halaman masjid bahkan sampai luber ke jalanan.

Sedangkan untuk umat Kristen dengan rasio 1 gereja untuk 82 umat dapat dikatakan cukup memadai. Sedangkan untuk umat Katolik khususnya di Desa Mbawa dengan rasio 1 gereja untuk 874 umat dapat dikatakan kurang memadai. Sehingga perlu perluasan bangunan atau penambahan jumlah gereja. Meski peribadatan umat Katolik dapat dilakukan dengan cara sif.

Jumlah penyuluh agama Islam di Kecamatan Donggo sebanyak 9 orang penyuluh honorer yang berada di setiap desa dan penyuluh PNS satu orang. Jumlah lembaga pendidikan Islam, MIN 2, MTsN 2, sedangkan jumlah sekolah umum, SDN 21, SMP 9, SMA 1 dan SMK 2. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan baik umum maupun agama ini cukup memberikan perubahan yang signifikan bagi kemajuan generasi muda Donggo. Dahulu taraf kehidupan masyarakat Donggo masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan etnis-etnis lain. Dalam pendidikan masih belum maju, banyak anak-anak yang belum mengenyam pendidikan. Kehidupan mereka jarang tersentuh pengaruh luar, sehingga lambat untuk menerima perubahan (Ibid: 38). Menurut

Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Rahman, etnis Donggo termasuk tipe masyarakat pedesaan dan tidak mengalami gelombang pengaruh kebudayaan luar (Ibid: 38-39). Namun saat ini masyarakat Donggo sudah jauh lebih maju, terutama dalam pendidikan. Meski mereka masih banyak yang tinggal di rumah panggung dengan ukuran yang relatif kecil, tetapi hampir setiap keluarga memiliki anggota keluarga yang telah menyandang titel sarjana.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Donggo mayoritas (sekitar 95%) sebagai petani dan sekaligus sebagai peternak. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang menjadi guru (PNS) atau sebagai pedagang. Petani di Donggo hanya mengandalkan curah hujan (petani tadah hujan), karena irigasi di kecamatan ini belum tertata dengan baik di samping karena langkanya sumber air. Oleh karena itu mereka hanya bisa menanam padi atau palawija sekali setahun. Untuk penanaman padi, mereka sering kali mengalami gagal panen (puso) karena pada waktu tanaman padi mulai berbunga sudah tidak turun hujan dan mengalami kekeringan. Selain menanam padi, petani di Kecamatan Donggo juga menanam jagung, kedelai, dan tanaman keras seperti jambu mede, kemiri, cengkeh, coklat dan kopi. Selain tanaman tersebut terdapat tanaman keras untuk bahan bangunan, seperti jati dan tanaman bahan bangunan lainnya. Sebagai usaha sampingan, mereka juga berternak sapi, kerbau, kambing, dan kuda.

Dilihat dari sisi ekonomi, penduduk Kecamatan Donggo tergolong miskin. Untuk meningkatkan penghasilan atau perbaikan nasib, sebagian pemuda Donggo mengadu nasib ke negeri Jiran untuk mengais ringgit. Keberhasilan para pahlawan devisa dari Donggo ini ditengarai antaralain mampu membangun rumah permanen (Wawancara dengan Sudirman SAg, dan beberapa informan

lain di Kecamatan Soromandi, 17 November 2012), meskipun dengan bentuk dan model yang sederhana, serta ukuran yang “relatif” kecil.

### Potensi Ekonomi

Kerukunan keagamaan adalah sebuah kondisi yang dinamis, selalu *on going process* dan selalu berubah di setiap saat. Kondisi kerukunan tergantung bagaimana lingkungan strategis di sekitarnya. Di antara lingkungan strategis yang secara teoritik sangat berpengaruh adalah lingkungan sosial keagamaan, ekonomi, politik, dan keamanan (Tholhah, 2013: xiii-xiv). Tidak jarang akar permasalahan konflik SARA yang terjadi di negeri ini bersumber dari masalah kemiskinan dan perebutan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, potensi ekonomi perlu dikemukakan untuk melihat potensi konflik secara sistemik. Kecamatan Donggo memiliki potensi ekonomi yang prospektif, antara lain:

1. Susu kuda liar, yang merupakan produk khas Kabupaten Bima yang cukup terkenal hingga tingkat nasional sebagai obat penyakit leukemia (kanker darah). Namun kuda perah di Donggo belum dibudidayakan secara maksimal, sehingga produk susunya masih sangat terbatas.
2. Lebah madu, juga merupakan produk andalan dari Kabupaten Bima. Madu lebah dari Bima dahulu terkenal kualitasnya. Namun masyarakat Donggo belum ada yang membudidayakan lebah madu. Produk madu masih mengandalkan perburuan sarang lebah di hutan. Untuk memenuhi kebutuhan pasar akhirnya pedagang madu memproduksi madu buatan atau mengoplos madu dengan air gula.
3. Perikanan yakni bandeng dan kerang mutiara.
4. Pertambangan berupa emas, pasir besi dan batu bara
5. Hasil Hutan yaitu kayu jati dan cendana/gaharu (Wawancara dengan Samsuddin, Kepala MI Al Ikhlas Donggo, 19 November 2012).
6. Pariwisata, antara lain:
  - a. Pacuan kuda yang merupakan atraksi rutin di Kabupaten Bima.
  - b. Peninggalan purbakala batu tulis dan peninggalan dari jaman Megalitikum, ada yang menyebut sebagai peninggalan Patih Gajah Mada yang situsnya terdapat di Desa Bumi Pajo (Wawancara dengan M. Ridwan via telepon, 17 November 2012, peneliti tidak berhasil sampai situs tersebut karena letaknya yang cukup jauh dari pemukiman penduduk Desa Bumi Pajo).
  - c. *Uma leme* ‘rumah adat’ (Wawancara dengan Samsuddin, Kepala MI Al Ikhlas Donggo, 19 November 2012) dan kehidupan masyarakat yang masih natural yang merupakan potensi yang belum banyak diketahui. Beberapa informan kami mengatakan bahwa banyak wisatawan asing yang datang ke wilayah Kecamatan Donggo, meskipun menurut beberapa informan kami di Kecamatan Donggo tidak ada obyek wisata yang menarik, sehingga mereka mencurigai kehadiran para wisatawan tersebut. Sisi pandang informan kami (penduduk setempat) berbeda dengan sisi pandang para wisatawan asing. Bagi wisatawan asing kehidupan masyarakat yang masih natural merupakan daya tarik tersendiri.

Sehingga kehidupan masyarakat Donggo yang masih natural ini merupakan potensi wisata yang memiliki nilai jual yang dapat dijadikan sebagai sumber daya peningkatan ekonomi rakyat, apalagi jika didukung dengan penataan *land scape* sekitar teluk Bima. Donggo selain menarik bagi wisatawan juga menarik bagi ilmuwan asing, hal ini terbukti dengan adanya seorang ilmuwan, Peter Just (2001) yang menulis disertasi dengan judul: *Dou Donggo: Conflict and Morality in an Indonesian Society* (Wawancara melalui SMS dengan Dr. Adlin Sila).

Bagi para pengambil kebijakan di Donggo khususnya dan di Kabupaten Bima umumnya kurang menyadari akan potensi ekonomi yang sekaligus merupakan *competitive advantage* yang dimiliki untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran rakyat. Terutama pengembangan industri pariwisata, padahal industri pariwisata merupakan jenis industri yang paling handal dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan industri-industri apapun. Produk industri pariwisata tidak pernah “habis dijual”, bersifat “*quick yielding*” juga sebagai “*the smokless industry* (Yoeti, 1990: 3).

Ketiga potensi ekonomi di atas dapat dikembangkan secara terpadu, bahkan berkaitan dengan kearifan lokal berkenaan dengan konservasi alam pemeliharaan sumber air. Kearifan lokal berkaitan dengan konservasi alam (pelestarian sumber air) ini diabadikan dalam bentuk monumen di simpang tiga tidak jauh dari Marina Hotel, berupa “*padasa*” (Jawa: *padasan*) tempat air dari tanah liat untuk wudlu yang maknanya agar keberadaan air di *padasa* tetap terjaga (tidak pernah kosong), masyarakat wajib memelihara kelestarian sumber air

dengan pelestarian hutan (Wawancara dengan H. Asbah Natif Ama, Ketua MUI Kecamatan Donggo di atas kendaraan dari Bima menuju Donggo, 16 November 2012). *Ngaha aina ngako* jangan merusak lingkungan atau memabat hutan kayu untuk kepentingan pribadi (Wawancara dengan Arifin J. Anat, SH, Ketua Adat Masyarakat Donggo, di Kantor Kemenag Kab. Bima, 16 November 2012). Sebagai contoh, peningkatan produk madu lebah dapat dilakukan dengan program penghijauan terutama penghijauan dengan pohon buah-buahan yang bunganya banyak mengandung nektar yang sangat dibutuhkan oleh lebah madu. Penghijauan di sepanjang pantai teluk Bima “khusus pohon flamboyan”, akan semakin mempercantik Teluk Bima untuk menarik wisatawan. Jika Jepang bisa menarik wisata dengan bunga sakura, Bima seharusnya bisa menarik wisata dengan bunga flamboyan.

Bunga flamboyan termasuk bunga sempurna banyak mengandung nektar dan disukai lebah madu. Sehingga pengembangan wisata Teluk Bima dengan “taman flamboyan” ini sekaligus dapat meningkatkan produk madu lebah ([Http://www.haidlorblogspot.com](http://www.haidlorblogspot.com)). Dengan semakin hijaunya wilayah Donggo dan umumnya Kabupaten Bima akan dapat memelihara siklus hidrologis, mencegah banjir di musim hujan dan terhindar dari bencana kekeringan di musim kemarau. Hal ini akan banyak menyediakan rumput-rumput hijau yang dibutuhkan bagi peternakan kuda sehingga akan meningkatkan produk susu kuda liar. Karena pembudidayaan kuda perah di Bima masih sangat tradisional, sehingga produk susunya sangat terbatas, sehari hanya sekitar satu botol minuman kemasan ukuran 600 ml (Wawancara dengan beberapa informan di rumah Kepala KUA Soromandi, Kab. Bima, 17 November 2012).

## Kerukunan di Kecamatan Donggo

Kecamatan Donggo yang dihuni tiga kelompok penganut agama, yakni: Islam, Katolik dan Kristen ini termasuk zona damai. Di wilayah kecamatan yang berada di dataran tinggi Gunung Lembitu ini tidak pernah terjadi konflik (Wawancara dengan beberapa orang informan baik secara langsung maupun tidak selama keberadaan saya di Bima). Meskipun di kecamatan lain seperti Kecamatan Sape, Lambo, Pali Belo, Belo dan Woha sering terjadi konflik (Wawancara dengan Suhardi dan Muhtar Faisal Pegawai Kecamatan Donggo, 18 Novemer 2012). Kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Donggo lebih dikarenakan adanya hubungan darah atau garis keturunan yang sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda (Wawancara dengan beberapa informan dari penganut agama yang berbeda jawabannya sama).

Pada waktu Megawati Sukarno Putri menjadi presiden dan Sony Kerraf sebagai menteri lingkungan hidup, Sony Kerraf pernah melakukan kunjungan kerja ke Donggo dan memberikan bantuan dana pembangunan untuk membangun kembali Gereja Gema Injil di Kampung Jango. Hingga sekarang, keberadaan gereja tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat sekitar yang berbeda agama. Ini tentunya sebagai bukti toleransi umat Muslim setempat yang masih memiliki hubungan keluarga (Wawancara dengan Suhardi dan Muhtar Faisal, pegawai Kec. Donggo; wawancara dengan Jafar, Juliana Boru Sembiring, Anwar dan Samsuddin, 19 November 2012).

## Konflik yang Pernah Terjadi

### *Konflik Vertikal*

Masyarakat Donggo pernah melakukan demonstrasi besar-besaran pada tahun 1972 di era Bupati Suharmaji.

Para demonstran melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati untuk menuntut pemerataan pembangunan. Namun, karena banyak demonstran yang membawa senjata tajam, sebelum sampai ke Kantor Bupati, rombongan demonstran dihadang oleh petugas keamanan di Kecamatan Woha. Kemudian kepada para demonstran Pemerintah Daerah menjanjikan akan melakukan pengaspalan jalan menuju Kecamatan Donggo. Namun janji tersebut tidak pernah direalisasikan. Pengaspalan jalan ke Donggo baru direalisasikan pada tahun 1989 pada waktu H. Hariyanto menjabat sebagai Bupati Bima. Akibat aksi tersebut beberapa tokoh Donggo ditahan, mereka adalah: H. Kaho, H. Abdul Majid Bakri, H. M. Ali Tamrin, H. Abbas Oya. BA, dan Jamaluddin Yasin (Wawancara dengan Suhardi dan Muhtar Faisal Pegawai Kecamatan Donggo, 18 Novemder 2012).

### *Konflik Horisontal*

Pada tahun 1972, Gereja Gema Injil di Kampung Sengari dibakar massa. Kemudian umat Kristen membangun rumah tinggal di Jango di lingkungan umat Islam dan digunakan sebagai tempat kebaktian. Pada tahun 2000 sebagai imbas dari konflik nasional yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, di wilayah Kecamatan Donggo juga terjadi konflik horizontal. Gereja Gema Injil di Jango kembali dibakar massa (Wawancara dengan Samsuddin, Kepala MI Al Ikhlas Donggo, 19 November 2012). Kemudian, gereja tersebut dibangun kembali atas bantuan Sony Keraff dan tidak pernah dipermasalahkan hingga sekarang.

## Potensi Konflik

1. Pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadah. Sebagai mana keberadaan rumah tinggal di Jembatan Dano, yang dimanfaatkan

sebagai tempat kebaktian dan sebagai tempat transit truk ekspidisi sembako trans Jawa-Timor. Sebagaimana tokoh dan masyarakat Muslim – mengacu kepada pengalaman – menghawatirkan di tempat tersebut lama kelamaan akan dibangun tempat ibadat yang permanen dan megah (Wawancara dengan Samsuddin, Kepala MI Al Ikhlas Donggo, 19 November 2012).

2. Tempat penjualan miras. Di tempat transit truk ekspidisi tersebut disinyalir juga digunakan sebagai tempat penjualan miras. Keberadaan tempat penjualan miras di lingkungan warga Muslim ini sangat meresahkan. Ada kekhawatiran para orang tua di Donggo terhadap anak-anak mereka kalau sampai terjerumus ke dalam kebiasaan minum miras (Wawancara dengan H. Asbah Natif Ama, Ketua MUI Kecamatan Donggo, 16 November 2012 dan Moh. Sanan, Kepala KUA Donggo di 17 November 2012). Pihak yang berwajib hendaknya belajar dari konflik Poso yang antara lain dipicu karena keberadaan tempat penjualan miras (Syahadat, 2007: 2).
3. Kawin campur (berbeda agama), karena berakibat terjadinya konversi agama. Perkawinan berbeda agama ini tidak dikehendaki oleh undang-undang, maka jika ada calon pengantin yang berbeda agama sebelum melaksanakan perkawinan salah satu calon melakukan konversi agama. Sementara perpindahan agama tidak disukai oleh masyarakat Donggo pada umumnya (Wawancara dengan beberapa informan yang berbeda-beda agama, 16, 17, 18 November 2012). Meski sebagian penganut agama mengatakan masalah cinta merupakan urusan pribadi seseorang. Sedangkan kelompok

agama yang lain dan berdasarkan adat yang berlaku di Donggo “keluar dari agama” sama dengan “keluar dari keluarga” (Wawancara dengan tokoh 3 kelompok agama ditempat yang berbeda, 16, 17. 18 November 2012).

### Kearifan Lokal dan Kerukunan

- a. Masyarakat Donggo sebagai masyarakat patronase masih sangat menghargai petuah orang-orang tua. Penghormatan terhadap orang tua dan orang yang dituakan masih tinggi. Petuah tokoh-tokoh agama dipandang sebagai penyejuk hati masyarakat (Wawancara dengan H. Asbah Natif Ama, Ketua MUI Kec. Donggo, 16 November 2012). Meski belakangan ini ketaatan anak-anak muda terhadap orang-orang tua dan yang dituakan mulai luntur.
- b. *‘Maja labo dahu’* merasa malu dan takut pada perbuatan yang salah merupakan kearifan lokal yang dijadikan motto Kabupaten Bima. Anggota masyarakat di wilayah Donggo dan umumnya Kabupaten Bima memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan yang salah (*deviant*), sehingga masyarakat di wilayah ini cenderung berperilaku baik sesuai dengan norma-norma dan tatanan adat setempat (Wawancara dengan Arifin J. Anat, SH, Ketua Adat Kecamatan Soro Mande, 16 November 2012).
- c. *Mbolo weki* (musyawarah bersama), Jika ada masalah dibicarakan bersama.
- d. *Tekara nee* (sumbang sih), hal ini biasanya dilakukan dalam upacara siklus hidup, hajatan naik haji dan doa syukuran sehabis panen atau anak tamat sekolah, semua warga tidak pandang agama berdatangan

dan membawa sumbangan, baik berupa uang atau bahan makanan.

- e. Masih kuatnya adat, yakni keberadaan Lembaga Adat dan Syariat Donggo (LASDO) yang menangani: (1) konflik tanah; (2) perselingkuhan/perzinahan; (3) perkelahan pemuda antar kampung (Wawancara dengan Samsuddin, Kepala MI Al Ikhlas Donggo, 19 November 2012). Jika terjadi pelanggaran adat segera diselesaikan secara adat dan konflik pun dapat dihindarkan. Bahkan untuk penyelesaian kasus perselingkuhan (perzinaan) hukum adat masih kuat. Jika ada kasus perselingkuhan, pelakunya dicambuk dan diarak (*dibaja*) dari Desa Mpili sampai Dori Dunga. Sepanjang jalan pelaku meneriakkan kata-kata “jangan berbuat seperti saya, inilah akibatnya”. Setelah selesai pelaksanaan hukuman, jika pelaku perempuan sudah bersuami, suaminya diminta untuk menceraikan. Selanjutnya pelaku perselingkuhan dikawinkan. Jika pelaku perempuan dalam keadaan hamil, ditunggu sampai melahirkan, baru kemudian dikawinkan. Pelaksanaan hukum adat ini didukung oleh pemerintah setempat. Kalau adat yang melakukan sangsi terhadap pelaku tindak kejahatan hingga mengakibatkan kematian tidak ada yang menuntut. Jika ada yang menuntut, yang bersangkutan malah bisa kena sangsi (Wawancara dengan Suhardi dan Muhtar Faisal, pegawai Kantor Camat Donggo, 18 November 2012).

### **Respon Tokoh Agama/Adat terhadap Wadah Kerukunan.**

Di Kecamatan Donggo sudah didirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat kecamatan pada

tahun 2007, dengan susunan pengurus: Ketua: H. Salman, SMHk, Camat Donggo (Muslim); Wakil Ketua: Johannes Jafar (Kristen); Sekretaris Samsuddin (Islam); Wakil Sekretaris: Andreas Usman (Katolik). Namun kepengurusan FKUB tersebut belum diresmikan (belum ada SK-nya). Latar belakang dibentuknya FKUB tingkat kecamatan tersebut karena adanya kawin campur, yang menimbulkan keresahan masyarakat (Wawancara dengan Samsuddin, Kepala MI Al Ikhlas, Donggo, 19 November 2012).

Respon tokoh agama/adat terhadap wadah kerukunan sebelum diadakan FGD, secara umum sepakat atas keberadaan wadah kerukunan di Donggo, mereka memandang keberadaan wadah kerukunan sangat perlu, agar antarumat beragama dapat bersilatullahi, sehingga keakraban dapat terpelihara dengan baik dan konflik antarumat dapat dihindarkan (Wawancara dengan Ignais Ismail, Kategis Gereja Katolik Kecamatan Donggo, Muh. Sanan, SPdi, Kepala KUA Kecamatan Donggo, 16 November 2012). Keberadaan wadah kerukunan menjadi sangat penting, terutama jika para pengurus wadah tersebut adalah tokoh-tokoh agama yang disegani oleh masyarakat dan penganut agama masing-masing. Keberadaan wadah kerukunan akan semakin menambah eratnya kerukunan umat beragama. Disamping itu, keberadaan wadah kerukunan di tingkat kecamatan dapat memperlancar arus informasi (deteksi dini) dari munculnya gejala-gejala konflik (Wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Donggo).

Sebelum diadakan FGD yang dipandang sebagai wadah kerukunan oleh para responden adalah FKUB tingkat kecamatan.

Respon tokoh agama/adat terhadap wadah kerukunan pada waktu diselenggarakan FGD semakin

menegaskan pentingnya keberadaan wadah kerukunan, meski sebagian besar peserta FGD tidak setuju jika wadah kerukunan yang dimaksud adalah FKUB tingkat kecamatan. Mereka justru lebih memilih LASDO sebagai wadah kerukunan dengan catatan dengan revitalisasi dan menjadikan LASDO semakin lebih representatif bagi wadah kerukunan seluruh umat yang ada di Kecamatan Donggo. Dengan demikian diharapkan LASDO juga dapat difungsikan sebagai ketahanan masyarakat lokal Donggo.

### Kesimpulan

1. Kerukunan di wilayah Kecamatan Donggo cukup baik. Meski di wilayah ini terdapat tiga kelompok penganut agama tetapi mereka dapat hidup berdampingan secara damai. Konflik yang pernah terjadi berupa: a) konflik vertikal antara rakyat dan pemerintah pada th 1972, masyarakat Donggo menuntut keadilan (pemerataan pembangunan) dengan melakukan demonstrasi besar-besaran; b) Pada tahun 1972 terjadi pembakaran rumah ibadah yang didirikan di lingkungan umat lain; pada tahun 2000, yakni konflik antar umat beragama sebagai imbas dari konflik yang terjadi di tingkat nasional. Di Donggo terjadi pembakaran terhadap rumah ibadah yang pernah dibakar pada tahun 1972.
2. Potensi konflik yang ada di wilayah Kecamatan Donggo yang dapat diidentifikasi antara lain: a) Keberadaan rumah tinggal dan transit truk ekspedisi sebagai tempat kebaktian dan tempat penjualan miras; b) Kawin campur (berbeda agama), karena berakibat terjadinya konversi agama.
3. Kearifan lokal sebagai upaya mempertahankan kerukunan yang

dimiliki oleh masyarakat Donggo, antara lain: a) Masyarakat Donggo sebagai masyarakat patronase masih sangat menghargai petuah orang-orang tua; b) *Maja Labo Dahu*, merasa malu dan takut pada perbuatan yang salah; c) *Mbolo weki* (musyawarah bersama), Jika ada masalah dibicarakan bersama; d) *Tekar nee* (sumbang sih); e) Masih kuatnya adat (keberadaan LASDO) jika terjadi pelanggaran adat segera diselesaikan secara adat dan konflik pun dapat dihindarkan.

4. FKUB tingkat kecamatan pernah dibentuk namun belum diresmikan. Para tokoh agama/masyarakat (setempat) memberikan respon positif terhadap pengembangan wadah kerukunan. Namun kemudian yang direvitalisasi sebagai wadah kerukunan dan ketahanan lokal adalah lembaga adat LASDO.

### Rekomendasi

1. Potensi konflik sebagaimana telah teridentifikasi hendaknya dapat diantisipasi, sehingga kondisi kerukunan di Kecamatan Donggo dapat dipelihara dengan baik.
2. Kearifan lokal yang berfungsi sebagai sarana kerukunan dan dapat difungsikan ketahanan masyarakat untuk mengatasi konflik hendaknya dapat terus dijaga kelestariannya baik oleh masyarakat sendiri maupun aparat.
3. Keberadaan LASDO setelah direvitalisasi hendaknya dapat dijadikan sebagai stimulator bagi pengembangan wadah kerukunan beragama dan ketahanan lokal. Untuk mewujudkan kerukunan dapat dilakukan dengan mengalihkan perhatian masyarakat misalnya, pada kegiatan gotong-royong

pengembangan bidang ekonomi dan pelestarian alam, penghijauan secara terpadu – di pedesaan dengan pohon buah-buahan di perkotaan (sepanjang pantai teluk Bima dengan bunga flamboyan – dengan semakin hijaunya wilayah Donggo diharapkan dapat meningkatkan produk lebah madu dan susu kuda liar. Demikian pula dengan semakin indahya teluk Bima dengan bunga flamboyan akan dapat meningkatkan kecintaan

warga Donggo terhadap daerahnya dan meningkatkan pengembangan industri pariwisata yang akhirnya akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan mengalihkan perhatian masyarakat pada pengembangan ekonomi diharapkan ketegangan hubungan antarumat beragama akan terlupakan sehingga tidak akan pernah terjadi lagi konflik-konflik seperti dahulu.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Haidlor Ali, "Kearifan Lokal Menuju Keharmonisan Hidup Beragama di Desa Gempolan, Gurah, Kediri, Jawa Timur" dalam Rudy Harisyah Alam (ed.), *Adaptasi dan Resistensi Kelompok-kelompok Sosial Keagamaan*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta dan Penamadani, 2006.
- \_\_\_\_ (1), "Kearifan Lokal dan Kehidupan Beragama di Kota Medan Sumatera Utara", dalam Anik Farida (ed), *Kearifan Lokal di Berbagai Daerah*. Jakarta: Departemen Agama RI, Balai Litbang Agama Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_ (2), "Revitalisasi Kearifan Lokal untuk Kerukunan Umat Beragama di Kec. Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah", *Harmoni*, Nomor 23, Vol. VI, 2007.
- \_\_\_\_, "Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan di Provinsi Sulawesi Tenggara", dalam Tim Peneliti, *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2012
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: 2008.
- \_\_\_\_, "Sambutan Menteri Agama", *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya*, 2010.
- Hakim, Bashori A., "Kajian Tentang Revitalisasi Wadah Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Tenggara, Studi Perkembangan FKAUB Kecamatan Mandonga, Kota Kendari", dalam Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Revitalisasi Wadah Kerukunan Antar Umat Beragama di Berbagai Daerah*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2007.
- Kustini, "Kajian Tentang Revitalisasi Wadah Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bali, Studi Perkembangan FKUB Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng", dalam Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Revitalisasi Wadah Kerukunan Antar Umat Beragama di Berbagai Daerah*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2007.
- Marzali, Amri, *Kearifan Budaya Lokal dan Kerukunan Bearagama*, (makalah t.t.). Jakarta: 25 Agustus 2005.

Rahman, M. Fachrir, Drs. H. MA., *Islam di Bima: Kajian Historis Islamisasi Era Kesultanan*. Mataram: Alam Tara Learning Institute, 2011.

Rahman, M. Fachrir, Drs. H. MA., dan Nur Mukminah, Dra. Hj., *Nika Mbojo Antara Islam dan Tradisi*. Mataram: Alam Tara Learning Institute, 2011.

Syahadat, A. Malik, Drs. , *Poso Kemarin, Hari Ini dan Esok*, (makalah t.t.). Poso: 2007.

Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Revitalisasi Wadah Kerukunan Antar Umat Beragama di Berbagai Daerah*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2007.

Yoeti, Oka A., *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1990.